



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN  
SETJEN DPR RI**

# **KEGIATAN**

## **MS II Tahun Sidang 2021-2022**

### **(15 – 26 November 2021)**

---

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

**DIKELOLA OLEH:**

**TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.**

# DAFTAR ISI

<b>KOMISI II</b> .....	<b>1</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	1
B. FUNGSI ANGGARAN .....	1
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	1
D. TUGAS KHUSUS .....	4
<b>KOMISI III</b> .....	<b>5</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	5
B. FUNGSI ANGGARAN .....	6
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	6
<b>KOMISI IV</b> .....	<b>7</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	7
B. FUNGSI ANGGARAN .....	8
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	9
<b>KOMISI V</b> .....	<b>13</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	13
B. FUNGSI ANGGARAN .....	13
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	13

<b>KOMISI VI .....</b>	<b>15</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	15
B. FUNGSI ANGGARAN .....	16
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	16
<b>KOMISI VII .....</b>	<b>19</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	19
B. FUNGSI ANGGARAN .....	19
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	19
<b>KOMISI VIII .....</b>	<b>23</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	23
B. FUNGSI ANGGARAN .....	23
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	23
<b>KOMISI IX .....</b>	<b>26</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	26
B. FUNGSI ANGGARAN .....	26
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	27

<b>KOMISI X .....</b>	<b>39</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	39
B. FUNGSI ANGGARAN .....	39
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	39
<b>BADAN LEGISLASI .....</b>	<b>43</b>
<b>BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN .....</b>	<b>44</b>
<b>MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN .....</b>	<b>59</b>
<b>BADAN URUSAN RUMAH TANGGA .....</b>	<b>60</b>
<b>BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>62</b>

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Siber dan Sandi Negara	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, terkait kecurangan pada	1. Dengan terjadinya berbagai modus kecurangan dalam Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2021 di 9 (sembilan) titik lokasi dan potensi kecurangan yang diduga juga terjadi di titik lokasi lainnya, Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan audit teknologi dan investigasi mendalam terhadap seluruh pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021 dengan melibatkan institusi terkait.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pelaksanaan SKD CPNS Tahun 2021.	<p>2. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk dapat menjamin validitas data hasil SKD CPNS Tahun 2021 yang telah diumumkan pada masing-masing instansi Pemerintah.</p> <p>3. Menindaklanjuti tahapan SKB CPNS Tahun 2021 dan seleksi PPPK tahap II, Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah melakukan berbagai upaya peningkatan pengamanan sistem teknologi dan upaya antisipasi terhadap potensi kejahatan siber yang diduga terjadi selama pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021.</p> <p>4. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB untuk memberikan sanksi disiplin bagi oknum ASN serta memproses sesuai hukum bagi siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik kecurangan yang terjadi dalam</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021.</p> <p>5. Menindaklanjuti kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021, Komisi II DPR RI akan membentuk Panja Seleksi CPNS Tahun 2021 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN).</p>
2.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p>	Melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan	Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS
3.	Pemerintah Belanda dan Pemerintah Swiss	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p>	Melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Negara Swiss dan Negara Belanda	<p>1. Ke Negara Swiss terkait Sistem Data Pemilih Pemilu</p> <p>2. Ke Negara Belanda terkait Sistem Data Kependudukan</p>

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>OBJEK PENGAWASAN</b>	<b>INFO SINGKAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
4.	Pemerintah Daerah Kota Tangerang	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Tangerang	Terkait evaluasi pelaksanaan pelayanan publik

#### **D. TUGAS KHUSUS**

- a. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat;
- b. Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar;
- c. Persetujuan pemindahtanganan asset negara;
- d. Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas;
- e. Pemilihan anggota BPK;
- f. Penegakan kode etik;
- g. Kerja sama antar parlemen;
- h. Akuntabilitas keuangan;
- i. Kerumahtanggaan DPR RI;
- j. Lain-lain.



## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

#### **RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI**

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021, bahwa Komisi III DPR RI segera membahas RUU tentang Kejaksaan setelah terbitnya surat Presiden. Pelaksanaan pembahasan RUU tentang Kejaksaan Komisi III bersama Pemerintah didasarkan atas terbitnya Surat Presiden Nomor R-45/Pres/09/2021 tanggal 29 September 2021 kemudian dituangkan dalam Surat Wakil Ketua DPR RI/KOREKKU Nomor PW/14241/DPR RI/IX/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang menugaskan Komisi III agar kiranya dapat segera membahas RUU tentang Kejaksaan dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Pada tanggal 15 November 2021 dilaksanakn Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham diwakili oleh Wamenkumham, Jaksa Agung diwakili oleh Wakil Jaksa Agung, Menpan RB diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan RB, Menkeu diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara dan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu dengan agenda Penjelasan Komisi III DPR RI atas RUU tentang Kejaksaan, Pandangan Pemerintah, Penyerahan DIM, dan Pembentukan Panja. Rapat Kerja memutuskan bahwa Pembahasan DIM dilaksanakan pada tingkat Panja, dan Panja dipimpin oleh Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Pada tanggal 23 sd 24 November 2021 dilaksanakan Rapat Panja, membahas DIM yang bersifat yang bersifat PERUBAHAN SUBSTANSI dan DIM yang DIHAPUS serta DIM yang bersifat PENAMBAHAN NORMA, dapat dilakukan secara berurutan.

Panja melaksanakan Kunjungan Kerja Legislasi dalam rangka mendengarkan/menerima masukan berkaitan dengan substansi RUU tentang Kejaksaan dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah, sebagai berikut :

- a. Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Aceh tanggal 18 s.d. 20 November 2021.
- b. Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali, tanggal 25 s.d. 27 November 2021.
- c. Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2021.

**B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

**C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kepolisian Daerah 2. Kejaksaan Tinggi	KUNKER SPESIFIK	Pengawasan Penegakan Hukum: 1. Pengawasan Penanganan Covid-19 2. Pemulihan Ekonomi Nasional.	1. Pelaksanaan tanggal 18 sd 20 November 2021. 2. Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Bpk. Desmond Mahesa Djunaedi. 3. Provinsi Kalsel, dipimpin oleh Bpk. Pangeran Khairul Saleh.
2.	1. Kepolisian Daerah 2. Kejaksaan Tinggi	KUNKER SPESIFIK	Pengawasan Penegakan Hukum: 1. Pengawasan Penanganan Covid-19 2. Pemulihan Ekonomi Nasional.	1. Pelaksanaan tanggal 29 Nov sd 1 Des 2021. 2. Provinsi Banten, dipimpin oleh Bpk. Desmond Mahesa.

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Intern Panja	a. Penyempurnaan muatan materi dalam Ketentuan Umum, pengaturan konservasi di luar kawasan konservasi, serta pengaturan peran serta masyarakat, dan pengaturan sanksi pidana. b. Pembentukan Tim Perumus.	
2.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Tim Perumus	Perumusan dan penyempurnaan rumusan Konsep RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terutama terkait pengaturan konservasi di luar kawasan konservasi, pengaturan peran serta masyarakat, serta pengaturan larangan dan sanksi pidana.	
3.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Intern Panja	Laporan Tim Perumus kepada Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Intern Komisi IV	a. Laporan Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. b. Disetujuinya RUU atas Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk diteruskan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk diharmonisasi, sehingga dalam Rapat Paripurna terdekat dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.	

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian: 11 eselon I	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Tindak lanjut penajaman program kerja dan anggaran belanja Kementerian Pertanian TA 2022. b. Isu-Isu Aktual, Antara Lain: - Pupuk Bersubsidi - Antisipasi Perubahan Iklim - Ketersediaan Pangan - Prasarana dan Sarana Pertanian	
2.	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 13 Eselon I	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara;	a. Rencana Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2022 b. Isu-isu Aktual, antara lain:	Masih perlu dilaksanakan lagi RDP

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	b. Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove	c. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran Hutan dan Lahan di dalam dan di sekitar Taman Nasional Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>- Bencana banjir bandang di Batu, Malang, Jawa Timur;</li> <li>- Bencana banjir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat; serta</li> <li>- Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai FoLU Net Sink 2030 dengan zero deforestation pada saat rangkaian pelaksanaan COP26 di Glasgow, Inggris</li> </ul>	

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern Panja Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	Perumusan Rekomendasi Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan Kerja ke Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung</li> <li>- Melakukan panen raya dan tanam perdana komoditas jagung yang</li> </ul>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan Pemerintah	<p>dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan para pemangku kepentingan di lokasi RPIK Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninjau dan berdiskusi ke kebun percobaan perbibitan dan perbanyak benih di tegineneng, Lampung. Menerima aspirasi bantuan alsin pertanian pra panen dan pascapanen</li> </ul>	
3.	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<p>Kunjungan Kerja ke Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninjau Kawasan Pengembangan Klengkeng</li> <li>- Meninjau Pusat Garam Rakyat Di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen</li> <li>- Meninjau Kebun Pangan Bupati Kebumen dan Berdiskusi di Pendopo Bupati Kebumen</li> <li>- Tabur Benih Ikan Nila dan Gurami di Wonodipuro Farm Petanahan Kebumen</li> <li>- Meninjau Calon Lokasi Shrimp Estate dan berdiskusi di Hutan Cemara WANAGAMA III di Pantai Petanahan</li> </ul>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kunjungan Kerja Panja	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan di Kota Batam, Provinsi Batam - Mengunjungi dan diskusi di lokasi pelepasan kawasan Hutan Lindung untuk Pemukiman melalui Program Tanah Untuk Reformasi Agraria (TORA) di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. - Mengunjungi dan diskusi di Lokasi Perusakan Kawasan Hutan Lindung untuk pemukiman oleh korporasi di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa.	
5.	Kunjungan Kerja Panja	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Panja Hortikultura di Kota Brrbes, Provinsi Jawa Tengah - Meninjau dan berdiskusi dengan korporasi hortikultura PT SINergi Brebes Inovatif, dan pemangku kepentingan terkait guna mendapatkan masukan untuk rekomendasi panja	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Kunjungan Kerja Panja	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Panja Pencemaran Sampah dan Limbah di Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah - Meninjau dan melakukan pengambilan sampel air yang diduga tercemar oleh limbah industri rayon PT. Rayon Utama Makmur. - Menggali informasi dari masyarakat di sekitar lokasi pabrik yang terdampak pencemaran limbah.	



## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Rapat Panitia Kerja	Membahas Materi Panja yang di pending terkait substansi mengenai Pengusahaan Jalan Tol	
2.	RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pengurus Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI)	Memperoleh saran dan masukan dari ATI terkait materi muatan mengenai Pengusahaan Jalan Tol yang ada di dalam RUU yang sedang dibahas Komisi V DPR RI	

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara;	a. Provinsi Jambi; melakukan pertemuan dengan Gubernur Jambi, melakukan peninjauan	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah	pembangunan Jembatan Sungai Rambut, peninjauan Pelabuhan Ujung Jabung b. Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, melakukan pertemuan dengan Bupati Rembang dan melakukan peninjauan ruas jalan Nasional; c. Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan pertemuan dengan Bupati Bengkulu Utara, meninjau ruas jalan yang tergerus Abrasi, meninjau Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Lagita, meninjau penahan Abrasi Pantai Air Napal	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU BUMN	Konsinyering Tanggal 16-18 Nov 2021	Panja Komisi VI DPR RI mengadakan konsinyering untuk membahas naskah akademik dan RUU tentang BUMN. Narasumber yang hadir antara lain Badan Keahlian DPR RI dan Kementerian BUMN. Pada acara konsinyering tersebut Badan keahlian DPR RI dan Kementerian BUMN menyampaikan beberapa pokok pembahasan krusial yang perlu didalami dalam penyusunan RUU BUMN antara lain terkait definisi BUMN, rancangan badan pengelola, penugasan, anak perusahaan dan Sumber Daya Manusia.	Terkait bahasan tersebut, Komisi VI DPR RI meminta BK DPR RI untuk membuat alternatif rumusan RUU BUMN yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan pada rapat-rapat selanjutnya.
2.	RUU BUMN	Konsinyering Tanggal 26-28 November 2021	Panja Komisi VI DPR RI mengadakan konsinyering untuk membahas naskah akademik dan RUU tentang BUMN. Pada konsinyering kali ini, Kepala BKD menyampaikan rumusan pasal-pasal baru sebagai tindak lanjut dari hasil konsinyering sebelumnya.	Tindak lanjut hasil konsinyering sebelumnya.

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

## C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perum BULOG	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Perum BULOG dalam rangka mengetahui persiapan Perum BULOG untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok di hari Natal dan Tahun Baru. Komisi VI DPR RI dalam dialog meminta Perum BULOG tidak hanya menjaga ketersediaan stok bahan pangan tetapi juga harus menjaga kestabilan harga.	Kunjungan Kerja Spesifik Cirebon 19-21 November 2021
2.	PT Pertamina Patra Niaga	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga di Kota Cilegon Provinsi Banten terkait penyewaan <i>storage</i> kepada PT Orbit Terminal Merak dan sebagai tindak lanjut Kunker Komisi VI DPR RI pada masa Komisi VI periode lalu di tahun 2018 terkait hal yang sama yang dianggap sangat penting untuk mengetahui perkembangan terbarunya.	Kunjungan Kerja Spesifik Cilegon 19-21 November 2021
3.	PT Jamkrindo dan ITDC Mandalika	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lombok NTB. Kunjungan kerja dilakukan kepada PT Jamkrindo dan ITDC Mandalika.	Kunjungan Kerja Spesifik Cilegon 19-21 November 2021

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	PT BRI (Persero) Tbk	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Yogyakarta kepada PT BRI (Persero) Tbk dalam rangka mengetahui dukungan BRI ke pelaku UMKM melalui program Brilianpreneur.</li> <li>• Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya BRI untuk mendukung UMKM di Indonesia agar dapat Go Global</li> <li>• Komisi VI DPR RI mendorong agar BRI meningkatkan cakupan programnya sehingga lebih banyak UMKM di Indonesia yang dapat mendapatkan manfaat atas program Brilianpreneur.</li> </ul>	Kunjungan Kerja Spesifik Yogyakarta 22-24 November 2021
5.	PT Pertamina (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Cilacap bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini kilang minyak pasca terjadinya peristiwa kebakaran.</li> <li>• Komisi VI DPR RI meminta agar dilakukan investigasi dan evaluasi lebih dalam guna memastikan faktor penyebab terjadinya kebakaran tersebut.</li> <li>• Komisi VI DPR RI juga meminta Pertamina holding segera menyelesaikan Kajian2 teknis tangki dan kajian teknis safety di KPI yang bisa menghasilkan rekomendasi konkrit untuk segera diimplementasikan dan memprioritaskan penyempurnaan <i>lightning protection system</i>.</li> </ul>	Kunjungan Kerja Spesifik Cilacap 22-24 November 2021

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	PT BNI (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT BNI (Persero) di Kota Solo sebagai tindak lanjut Kunker Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan ke New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 September – 2 Oktober 2021.</li> <li>• Sebagai upaya untuk menaikkelaskan pengusaha UMKM kita, BNI meluncurkan program BNI Xpora yang diharapkan memberi solusi terintegrasi untuk mendampingi dan mendorong UMKM agar menjadi lebih produktif, memiliki literasi dan kapabilitas digital, serta mampu mengembangkan usahanya hingga menembus pasar ekspor dengan menggandeng diaspora dan calon <i>buyer</i> potensial di mancanegara.</li> <li>• Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya BNI untuk mendampingi UMKM di Indonesia agar mampu menembus pasar internasional.</li> <li>• Komisi VI DPR RI juga mendorong agar BNI terus diberikan kepercayaannya dalam penugasan pembinaan UMKM ke level yang lebih luas.</li> </ul>	Kunjungan Kerja Spesifik Solo 22-24 November 2021

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI b. Direktur Utama PT PLN (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Realisasi DMO sesuai Kepmen ESDM Nomor 139.K/ HK.02/ MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. b. Daftar perusahaan tambang yang terkena DMO (volume dan realisasinya). c. Realisasi kontribusi perusahaan-perusahaan pemegang IUP terhadap penerimaan Negara.	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			d. Kebutuhan Batubara PT PLN (Persero) dalam setahun dan daftar perusahaan yang menyuplai Batubara termasuk realisasi komitmen suplai Batubara untuk PT PLN (Persero).	
2.	Menteri ESDM RI dengan menghadirkan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan undang-undang;</li> <li>b. Pelaksanaan keuangan negara;</li> <li>c. Kebijakan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Strategi dan progress transisi energi terbarukan</li> <li>b. Dampak penerapan <i>carbon tax</i> terhadap sektor energi</li> </ul>	
3.	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan undang-undang;</li> <li>b. Pelaksanaan keuangan negara;</li> <li>c. Kebijakan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Sumatera Utara Peninjauan ke PLTA Sigura-gura PT Inalum (Persero), PLTA Asahan I PT BDSN, dan PLTA Asahan 3 PT PLN (Persero) di Kabupaten Toba</li> <li>b. Provinsi Jawa Barat Peninjauan ke Pabrik Perakitan PT Mercedes-Benz Indonesia di Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor</li> </ul>	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. Provinsi Jawa Timur Peninjauan ke Pertamina Hulu Energi West Madura <i>Offshore</i> (PHE WMO) dan progress Kawasan Sentra Industri di Kabupaten Bangkalan	
4.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Kunjungan kerja ke Negara Amerika Serikat dengan agenda : a. Pertemuan dengan Managemen Freeport Mc Morran (FCX) b. Kunjungan lapangan ke Tambang Freport Mc Morran di Morenci Mine c. Pertemuan dengan Managemen Air Products and Chemical, Inc d. Pertemuan dengan Managemen Intel Arizona e. Pertemuan dengan KJRI Los Angeles	
5.	a. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI); b. Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI);	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Dampak Kebijakan Impor Bahan Baku Industri	

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>OBJEK PENGAWASAN</b>	<b>INFO SINGKAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
	c. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI).			
6.	Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (AASIA)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Dampak Kebijakan Impor Bahan Baku Industri	
7.	Kementerian Perindustrian RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Penjelasan regulasi dan sistem pengawasan terkait Impor Bahan Baku Industri	
8.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Provinsi Lampung Peninjauan ke PT Sugar Lampung b. Provinsi Banten Peninjauan ke Halal Modern Valley, Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI	Pengelolaan UPT Asrama Haji di seluruh Indonesia	a. Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) mengenai Pengelolaan Asrama Haji. b. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Pengelolaan Asrama Haji telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Ditjen PHU Kementerian Agama RI dan <i>stakeholders</i> terkait.	Perlu perbaikan regulasi agar asrama haji dapat disewakan kepada swasta untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Panja telah melakukan kunjungan ke beberapa UPT. Asrama Haji untuk memastikan bahwa asrama haji dapat dikelola secara profesional, berdaya saing dan meningkatkan PNBP.</p>	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik ke perwakilan Mitra-mitra Komisi VIII DPR RI di berbagai daerah di Indonesia (Bukit Tinggi, Kebumen, Pare-pare, Bogor, Indramayu dan Lombok)	<p>a. Kebijakan mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di berbagai daerah di Indonesia;</p> <p>b. Implementasi bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19;</p> <p>c. Kesiapsiagaan bencana di berbagai daerah rawan bencana di Indonesia</p>	<p>a. Kebijakan PTM yang dilaksanakan di berbagai PTKN di Indonesia relatif berjalan baik karena dilaksanakan secara <i>hybrid/blended</i> (gabungan <i>off line</i> dan <i>on line</i>) dengan menempatkan faktor kesehatan sebagai prioritas utama.</p> <p>b. Bantuan sosial yang diimplementasikan pada masa pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup baik namun belum optimal karena validitas</p>	Perlu optimalisasi program dan anggaran dalam meningkatkan target atau capaian program.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih banyak dipertanyakan di daerah.</p> <p>c. Kesiapsiagaan bencana yang digelar menjelang akhir tahun ini diharapkan dapat meningkatkan mitigasi dan mereduksi jumlah kerugian baik jiwa maupun harta.</p>	
3.	Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Ukraina	Perlindungan sosial	Melakukan studi komparatif mengenai perlindungan sosial di Indonesia dengan di Ukraina	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada kegiatan Panja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan III TS 2021-2022.</li> </ul>

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	Tidak ada	....
2.	Badan Anggaran	a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	Tidak ada	.... ....

**C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan RDP dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan dan Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Tingkat Sertifikasi Kompetensi dan Produktifitas, terhadap penyediaan lapangan kerja</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas kualifikasi tentang jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan pada non ASN di lingkungan Pemda/pemprov sebagai tindak lanjut Inpres No.2 Tahun 2021 tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.</li> <li>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan melaksanakan indikator utama dan Sub Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diatur dalam Kepmenaker 206 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan peningkatan sertifikasi tenaga kerja dan sertifikasi profesi.</li> <li>4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan realisasi perluasan kepesertaan</li> </ol> </li> </ol>	Tanggal 15 November 2021, Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan RDP dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.</p> <p>Penjelasan Pengelolaan Iuran Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi Program JHT di tengah peningkatan jumlah perusahaan yang merugi dan PHK yang meningkat</p>	<p>melalui optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN.</p> <p>b. Menjalankan rencana kerja yang telah disusun secara maksimal melalui keterlibatan bersama dengan Kementerian dan Lembaga lainnya.</p> <p>c. Evaluasi dan mencari solusi terkait dengan hambatanhambatan pelaksanaan pencapaian target program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>d. Sosialisasi program-program BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka perluasan kepesertaan non ASN di daerah.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan Oleh anggota Komisi IX DPR RI dalam Raker dan RDP hari ini, selambat-lambatnya tanggal 22 November 2021.</p>	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan terhadap Proses dan Pembayaran Klaim COVID-19 ke: 1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Jawa Tengah 3. Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, dimana aturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19 yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2021. Aturan ini memberikan acuan terhadap pelaksana pelayanan pasien COVID-19 maupun bagi verifikator klaim pelayanan kesehatan untuk pasien COVID-19.</li> <li>Dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak masalah seperti <i>dispute</i> yang disebabkan oleh kendala administratif, sistem aplikasi yang bermasalah, perbedaan penafsiran antara</li> </ul>	Tanggal 16 November sampai 18 November 2021

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pihak rumah sakit dan verifikator, penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) kepada rumah sakit butuh waktu lama, serta yang tidak kalah penting adalah lamanya pembayaran yang diterima rumah sakit setelah dikeluarkannya BAHV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi IX DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan agar proses serta pembayaran klaim kepada rumah sakit yang melakukan pelayanan pasien COVID-19 dapat berjalan dengan lancar.</li> </ul>	
3.	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI serta IDAI, ITAGI, dan HOGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas pelaksanaan program vaksin reguler;</li> <li>2. Perkembangan pembahasan Program Imunisasi Nasional untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan capaian program imunisasi demi keberlanjutan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan (program BIAS) serta Program Imunisasi Nasional termasuk PCV, HPV, JE, dan Rotavirus dengan:</li> </ol>	Tanggal 22 November 2021, RDP dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>PCV, HPV, dan Rotavirus;</p> <p>3. Persiapan pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 202.</p>	<p>a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sistem pelaporan cakupan imunisasi sesuai jadwal sebagai dasar untuk pelaksanaan program vaksinasi tahun depan;</p> <p>b. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin dan distribusinya; dan</p> <p>c. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia vaksin PCV, HPV, dan Rotavirus untuk menjamin kontinuitas ketersediaan vaksin.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera merevisi SK Menteri Kesehatan No HK 01.07/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program Demonstrasi HPV tahun 2020-</p>	<p>Kementerian Kesehatan RI dan RDPU dengan Pengurus IDAI, ITAGI, dan HOGI</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2024, untuk memastikan komitmen pemerintah dalam rencana perluasan program vaksinasi HPV tahun 2022 di provinsi dengan prevalensi tinggi dan program nasional di tahun 2023, paling lambat awal Desember 2021.</p> <p>3. Untuk peningkatan cakupan imunisasi, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan sosialisasi untuk percepatan pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) serta Program Imunisasi Nasional (termasuk PCV, HPV, JE, dan Rotavirus) dengan melibatkan secara intensif pemerintah daerah, organisasi profesi, dan Komisi IX DPR RI.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota dalam RDP</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan RDPU hari ini, 22 November 2021 dan diserahkan paling lambat 29 November 2021.	
4.	Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Sosial RI dan DJSN, BPJS Kesehatan	Membahas permasalahan data dalam rangka sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<p>1. Komisi IX DPR RI mendesak Sosial RI untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan DJSN dan pemerintah daerah untuk percepatan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) guna memaksimalkan kuota peserta PBI tahun 2021 paling lambat Desember 2021;</li> <li>b. segera melakukan proses verifikasi peserta PBI Non-DTKS sehingga diintegrasikan ke dalam DTKS paing lambat Desember 2021;</li> <li>c. meningkatkan transparansi dan kriteria penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK);</li> <li>d. meningkatkan kecepatan respon dan penyederhanaan prosedur atas permintaan perubahan status kepesertaan PBI yang disampaikan oleh masyarakat;</li> </ul>	Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Sosial RI dan RDP dengan Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e. berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan RI untuk menciptakan sistem komunikasi efektif kepada publik agar tidak menimbulkan persoalan pada saat penonaktifan peserta PBI; dan</p> <p>f. secara aktif mensosialisasikan setiap kebijakan terkait dengan perubahan data PBI.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melakukan verifikasi peserta PBI dalam DTKS maupun Non-DTKS serta membantu dalam pembuatan skema yang efektif dan efisien terkait penggantian data PBI utnuk memenuhi kuota yang tersisa dari PBI Non-DTKS.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sosial RI melakukan pemadanan dan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>cleansing</i> data secara rutin mengingat banyaknya data PBI yang belum padan yang seharusnya bisa segera ditetapkan penggantinya, termasuk bayi baru lahir dari ibu PBI, pekerja 6 bulan setelah PHK dan korban bencana.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pemenuhan peserta segmen PBI tahun 2022 sebagaimana kuota yang telah ditetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa.</p>	
5.	Kelembagaan	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Perlindungan Pekerja Informal pada masa Pandemi Covid-19 ke:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam 2 (dua) tahun ini, tentunya tidak saja berdampak pada bidang kesehatan, namun juga ekonomi dan pembangunan ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang membatasi aktivitas produksi, pengurangan jam kerja sampai mengurangi</li> </ul>	Tanggal 25 November sampai 27 November 2021

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		a. Provinsi Kepulauan Riau (Batam) b. Provinsi Kalimantan Timur (Balikpapan) c. Provinsi Maluku Utara	jumlah pekerja (PHK dan dirumahkan). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan pekerja mengalihkan pekerja formal menjadi pekerja di sektor informal.</li> <li>• Bila melihat data BPS, di tahun 2020, terjadi kenaikan jumlah pekerja informal sebesar 3,59 juta atau 4,84 persen menjadi 77,68 juta dibanding tahun 2019. jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 2,64 juta menjadi 78,14 juta</li> <li>• Berdasar data Pusdatinaker Kemnaker RI, hingga 31 Juli 2020, terdapat sekitar 2,146,667 pekerja terdampak covid-19. Jumlah ini tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. 5 (lima) Provinsi dengan jumlah tertinggi yaitu Jawa Barat (15.97 persen), DKI Jakarta (14.91 persen), Jawa Tengah (12.30 persen), Jawa Timur (7.51 persen) serta Riau (7.27 persen). Dilihat berdasarkan status terdampak Covid-19,</li> </ul>	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>untuk status PHK, 5 Provinsi dengan jumlah tertinggi yaitu Jawa Barat (27.99 persen), Jawa Tengah (12.35 persen), Jawa Timur (12.04), DKI Jakarta (10.39 persen) dan Kalimantan Timur (5.75 persen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan kondisi tersebut, Komisi IX DPR RI merasa penting untuk melihat secara langsung perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap pekerja informal pada masa pandemi covid ke 3 daerah yaitu Kepri, Maluku Utara dan Kalimantan Timur. Dimana dari hasil kunjungan tersebut ditemukan beberapa poin penting, antara lain:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih minimnya kepesertaan BPU (Informal) di di beberapa daerah, sehingga perlu peran pemerintah daerah bekerjasama dengan perusahaan besar (menggunakan dana CSR) untuk membantu agar pekerja informal yang rentan</li> </ol> </li> </ul>	

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>OBJEK PENGAWASAN</b>	<b>INFO SINGKAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
			akibat pandemi dapat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. b. Perlu mendorong peningkatan perlindungan terhadap pekerja informal yg terdampak pandemi Covid 19 melalui pendaftaran kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	15-17 November 2021 Konsinyasi Panja RUU SKN	Agenda Pembahasan Isu Krusial yang Pending	Substansi mengenai pendanaan dan kelembagaan masih belum ada keputusan ( <i>deadlock</i> )
2	15-17 November 2021 Konsinyasi Panja RUU PP	Agenda Membahas substansi pengaturan mengenai Pendidikan Psikologi	Panja telah menyepakati substansi pengaturan mengenai pendidikan psikologi

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<b>Kemendikbudristek</b>	19-21 November 2021 Menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan Kemendikbudristek RI dengan agenda membahas kurikulum dan pembelajaran	Komisi X DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum 2013 yang disampaikan oleh Kemendikbidristek RI	Konsep penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat selanjutnya

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2	<b>Kemenparekraf/ Baparekraf RI</b>	22-24 November 2021  Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke: 1. Destinasi Wisata Superprioritas Labuan Bajo-NTT 2. Destinasi Wisata Prioritas Tanjung Kelayang 3. Destinasi Wisata Superprioritas Mandalika-NTB.	1. Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Labuan Bajo sebagai Destinasi Superprioritas antara lain adalah masalah perizinan, masalah kekurangan dan kualitas SDM parekraf, pasokan produk pertanian dari masyarakat yang belum memenuhi standar, kendala pelaksanaan sertifikasi CHSE.  2. Beberapa kendala yang di temui di KEK Tanjung Kelayang antara lain adanya kebijakan pusat yang belum tuntas untuk diimplementasikan seperti tax holiday, yang menghambat investasi.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Destinasi pariwisata super prioritas Mandalika telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari sisi infrastruktur, transportasi, penginapan dan penguatan SDM Pariwisata, hal ini terlihat dari suksesnya event <i>World Superbike Mandalika 2021</i> yang baru berakhir mampu membangkitkan pariwisata dan ekonomi masyarakat setelah terpuruk selama masa pandemi COVID 19. Adapun beberapa permasalahan pengelolaan destinasi superprioritas Mandalika yaitu kurang maksimalnya investasi swasta karena terkendala	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pada status lahan dan dukungan aksesibilitas ke lokasi investasi.	
3	<b>Kemendikbudristek RI</b>	25 November 2021 RDPU dengan Presidium Majelis Ormas Islam (MOI)  <b>Agenda:</b> Menyampaikan aspirasi mengenai Permasalahan Permendikbudristek RI No. 30 Tahun 2021	MOI menuntut agar Permendikbudristek RI NO 30 Tahun 2021 di cabut.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	<b>BADAN LEGISLASI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="647 422 2110 533">1. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (16 November 2021, pukul 10.00 WIB).</li><li data-bbox="647 533 2110 643">2. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (17 November 2021, pukul 10.00 WIB).</li><li data-bbox="647 643 2110 986">3. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam ranjgka Pengambilan Keputusan atas hasil Pembahasan RUU tentang Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat, RUU tentang Pengadilan Tinggi Agama Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara, RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Manado, dan Mataram (22 November 2021, pukul 14.00 WIB).</li><li data-bbox="647 986 2110 1139">4. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan Narasumber dalam rangka harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (23 November 2021, pukul 10.00 WIB).</li></ol>

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSB	<p><b>12 - 18 November 2021</b></p> <p><b>Kunjungan Delegasi Diplomasi BKSAP ke Montenegro</b></p> <p>Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), dan beranggotakan Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Putu Supadma Rudana (F-PD), Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), Ichsan Firdaus (F-PG), Katherine Angela Oendoen (F-PGerindra), Heru Widodo (F-PKB), dan Syahrul Aidi Maazat (F-PKS).</p> <p>Kunjungan ini bertujuan untuk penguatan kerjasama antara DPR RI dan Parlemen Montenegro. Dalam kunjungan tersebut, delegasi melakukan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Parlemen Montenegro (Wakil Ketua Parlemen Montenegro dan Ketua Komite Hubungan Internasional dan Emigran)</li><li>2. Menteri Kesehatan Montenegro</li><li>3. Plt. Direktur Jenderal Direktorat Kerja Sama Perdagangan dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri</li></ol> <p><b>Hasil Pertemuan:</b></p> <p><b>1. Parlemen Montenegro (Wakil Ketua Parlemen Montenegro dan Ketua Komite Hubungan Internasional dan Emigran)</b></p> <p>Wakil Ketua Parlemen Montenegro menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia yang memiliki kesamaan dengan Montenegro, yaitu negara yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu pemasukan utama. Meskipun terpaut jarak yang jauh, kedua negara juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama</p>



NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>negara yang multietnis dan multikultural. Beliau mengingatkan bahwa tahun ini adalah tahun ke-60 Gerakan Non-Blok, yang masih mencerminkan semangat antikolonial untuk memperjuangkan identitas negara masing-masing.</p> <p>Ketua BKSAP menyampaikan pembebasan visa yang bersifat resiprokal akan membuka peluang lebih besar untuk mempererat hubungan kedua negara. Dalam kesempatan ini, Ketua juga mengundang anggota Parlemen Montenegro untuk berkunjung ke Indonesia guna memperkuat hubungan kedua parlemen.</p> <p>Delegasi juga mendapatkan jamuan makan siang dari Ketua Parlemen Montenegro, dimana dalam kesempatan tersebut Ketua Parlemen Montenegro menyampaikan bahwa kunjungan delegasi BKSAP merupakan kunjungan pertama pejabat tingkat tinggi Indonesia sejak hubungan diplomatik kedua negara terbentuk. Diharapkan kunjungan bersejarah ini dapat menjadi titik balik hubungan kedua negara.</p> <p><b>2. Menteri Kesehatan Montenegro</b></p> <p>Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat bahwa kerja sama antarnegara semakin penting terutama dalam rangka pertukaran pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19, kerja sama riset dan teknologi di bidang kesehatan dan pengobatan, dan pengadaan vaksin.</p> <p>Kedua negara juga bertukar pengalaman mengenai perkembangan Covid-19 dan bagaimana mendapatkan vaksin. Montenegro mengandalkan pengadaan vaksin melalui kerja sama bilateral dengan produsen vaksin. Hingga 5 November 2021, Montenegro telah memberikan dosis lengkap Covid-19 kepada 39 persen warganya.</p> <p><b>3. Plt. Direktur Jenderal Direktorat Kerja Sama Perdagangan dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri</b></p> <p>Indonesia dan Montenegro sependapat bahwa meskipun kedua negara terpisahkan oleh jarak geografis yang jauh, banyak potensi kerja sama yang bisa dikembangkan. Beberapa isu yang dibahas antara lain potensi kerja sama bidang pariwisata karena</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>kedua negara sama-sama tourism-oriented country. Demikian juga di bidang perdagangan, kedua negara memiliki keunggulan masing-masing. Montenegro adalah produsen olive oil dan anggur, sedangkan Indonesia merupakan penghasil kopi sebagai komoditas unggulan ekspor. Delegasi BKSAP DPR RI juga menawarkan kerjasama sister city antara kota di Indonesia dengan kota di Montenegro.</p>
	BKSAP - KSB	<p><b>19 – 25 November 2021</b></p> <p><b>Kunjungan Delegasi Diplomasi BKSAP ke Serbia</b></p> <p>Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Dr. Mardani Ali Sera (FPKS) dan beranggotakan Dr. Fadli Zon (F.P. Gerindra), Putu Supadma Rudana (F. PD), Achmad Hafisz Tohir (F.PAN), Muslim (F.PD), dan Hasbi Anshory (FP. Nasdem).</p> <p>Kunjungan ini bertujuan untuk penguatan kerjasama antara DPR RI dan Parlemen Serbia.</p> <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi melakukan pertemuan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Head of the Office for Cooperation with Churches and Religious Communities,</i></li> <li>2. Marko Jelic dari NUSANTARA <i>Serbian-Indonesian Friendship Society,</i></li> <li>3. Mufti Beograd Mustafa Jusufspahić,</li> <li>4. Grup Persahabatan Serbia – Indonesia, dipimpin oleh Ljiljana Malusic dan oleh Anggota Friendship Group antara lain : Jadranka Jovanovic, Milanka Jevtic Vukojicic, Natasa Jovanovic, Vuk Mircetic dan Viktor Jevtovic,</li> <li>5. Ketua Majelis Nasional Republik Serbia H.E. Mr. Ivica Dacic,</li> <li>6. Kelompok Minoritas/oposisi di Parlemen Serbia dipimpin oleh Imamovic Enis (Wakil Kelompok) dan anggotanya antara lain : Argjend Bajrami, Selm Kucevic dan Mirsad Hodzic</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>7. Asosiasi Sastrawan Serbia.</p> <p>8. Stevan Nikcevic, Wakil Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Telekomunikasi.</p> <p>9. Dubes RI untuk Serbia dan Montenegro di Beograd, Serbia</p> <p>Hasil Pertemuan :</p> <p><b>1. Dengan Head of the Office for Cooperation with Churches and Religious Communities</b></p> <p>Delegasi berdialog dengan Dr Ferid Bulić (<i>Assistant Director in the Department for Interfaith Dialogue</i>). Kedua pihak melakukan perbincangan yang hangat dan konstruktif serta berbagi ide dan pengalaman. Kedua pihak menyepakati pentingnya kelanjutan dialog antaragama antara Serbia dan Indonesia yang telah dilakukan di waktu lalu. Kerjasama lain yang penting ditingkatkan adalah sektor ekonomi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan pendidikan.</p> <p>Disebutkan pada dialog bahwa Serbia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan dalam hal perbedaan agama dan budaya, adanya kerukunan antarumat beragama di Serbia dan Indonesia serta adanya kerjasama yang baik antara gereja dan komunitas agama. Disepakati bahwa kerjasama antara Serbia dan Indonesia akan berada pada tingkat kerjasama dan proyek bersama yang lebih tinggi lagi.</p> <p><b>2. Pertemuan dengan Marko Jelic dari NUSANTARA Serbian-Indonesian Friendship Society</b></p> <p>Indonesia dan Serbia mempertahankan hubungan persahabatan tradisional selama lebih dari enam dekade. Karena tradisi hubungan baik antara bekas Yugoslavia dan Indonesia, maka pada 17 Agustus 2003, menandai HUT Kemerdekaan Indonesia, di Beograd, NUSANTARA didirikan. Nusantara adalah organisasi non-pemerintah, non-partai dan non-profit yang bertujuan untuk berkontribusi dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan persahabatan tradisional antara Serbia dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Indonesia; untuk membantu membangun kerjasama di sektor sosial, seni, pendidikan, budaya, olahraga dan bidang lainnya dengan memberikan kontribusi untuk penguatan dan pengembangan hubungan politik dan ekonomi dan kerjasama antara kedua negara; untuk mengatur kegiatan seni, budaya dan olahraga. Sementara Delegasi BKSAP sangat mengapresiasi dan mendukung NUSANTARA sebagai organisasi yang berkontribusi mempromosikan Indonesia di Serbia.</p> <p><b>3. Pertemuan dengan Mufti Beograd Mustafa Jusufspahić yang juga merupakan Imam di Masjid Bajrikli, Beograd.</b></p> <p>Disampaikan bahwa Indonesia merupakan negara populasi Muslim terbesar di dunia. Ia menjelaskan tantangan Muslim di Serbia sebagai kelompok minoritas termasuk upaya mendapatkan izin untuk menambah pembangunan masjid di Beograd yang saat ini berjumlah 15 masjid. Ia mengakui bahwa izin pembangunan masjid di Serbia masih dinilai sulit padahal jumlah Muslim di Serbia sekitar 6 persen termasuk sekitar 200 ribu di Beograd. Pada sisi lain, sambung dia, Presiden Serbia saat ini tengah berupaya membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas Muslim. Jusufpahic menyampaikan bahwa pihaknya memiliki madrasah dengan jumlah siswa 200 orang dan fakultas sains dengan jumlah mahasiswa 100 orang. Hal tersebut lantaran Undang-undang Serbia menjamin setiap komunitas agama untuk memiliki sendiri sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jusufpahic menjelaskan bahwa saat ini tengah diupayakan agar komunitas minoritas Muslim memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya di Parlemen Serbia. Sementara Mardani Ali Serba menyampaikan bahwa Indonesia punya hubungan sangat kuat dengan Serbia termasuk dengan komunitas Muslim Serbia.</p> <p><b>4. Pertemuan dengan Grup Persahabatan Parlemen Serbia – Indonesia</b></p> <p>Delegasi diterima oleh Ms. Ljiljana Malusic dan oleh Anggota Friendship Group antara lain : Jadranka Jovanovic, Milanka Jevtic Vukojicic, Natasa Jovanovic, Vuk Mircetic dan Viktor Jevtovic.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Topik sentral dalam pertemuan tersebut adalah membahas untuk memperdalam kerja sama antarpemerintah. Pada kesempatan tersebut Ljiljana Malusic mengatakan kegembiraannya atas kunjungan resmi Delegasi BKSAP meskipun masih di situasi pandemi. Ia menunjukkan bahwa kedua negara menikmati persahabatan tradisional yang baik sejak Gerakan Non-Blok dan hubungan bilateral yang terjalin pada tahun 1954. Disampaikan dia tentang program pertukaran pelajar Serbia-Indonesia dan investasi perusahaan Indonesia di Serbia mengingatkan pemerintah Serbia dan Indonesia telah menandatangani perjanjian tentang kerja sama ekonomi dan perdagangan jangka panjang. Ia sangat mendukung kerja sama yang baik dan peningkatan lebih lanjut. Dia juga menyinggung dialog antaragama antara Serbia dan Indonesia adalah bidang lain yang telah dikerjasamakan oleh kedua negara selama satu dekade. Dia berterima kasih kepada Indonesia atas posisinya yang berprinsip pada kedaulatan dan integritas teritorial Serbia dan menambahkan bahwa Serbia saat ini berkomitmen untuk menjadi anggota Uni Eropa yang hal tersebut dapat memberikan momentum untuk kerjasama yang lebih dalam. Dia menekankan bahwa Majelis Nasional Serbia berkomitmen untuk memperdalam kerja sama di tingkat antarpemerintah, antara komite parlemen, kelompok persahabatan parlemen dan delegasi resmi lainnya, serta memperkuat kerja sama ekonomi, budaya, wisata, pertahanan dan riset.</p> <p><b>5. Pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Republik Serbia H.E. Mr. Ivica Dacic</b></p> <p>Dacic merasakan kegembiraan atas kunjungan delegasi DPR RI tersebut. Ia menekankan bahwa Serbia dan Indonesia memiliki hubungan baik dan bersahabat sejak Gerakan Non-Blok didirikan. Dia lebih lanjut menyatakan kesiapan untuk melanjutkan penguatan hubungan bilateral secara keseluruhan antara kedua negara dengan mengintensifkan kerja sama antarpemerintah. Menurut dia, kegiatan kelompok persahabatan di parlemen Serbia dan Indonesia berkontribusi pada kerjasama yang erat antara kedua parlemen dan untuk bertukar kunjungan di tingkat ketua parlemen. Pada sisi lain ia berterima kasih kepada Indonesia atas posisi prinsipnya dalam masalah</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Kosovo-Metohija. Pada kesempatan tersebut ia memberikan penjelasan singkat tentang situasi saat ini di Kosovo-Metohija. Sementara Ketua Delegasi DPR RI Mardani Ali Sera sepakat bahwa hubungan kedua negara secara tradisional bersahabat dan perlu ditingkatkan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa ada ruang untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara di segala bidang, terutama ekonomi dengan populasi Indonesia sekitar 276 juta dimana 50% merupakan generasi milenial. Berbicara tentang Kosovo dan Metohija, dia menegaskan bahwa Indonesia menghormati prinsip-prinsip integritas teritorial dan kedaulatan dan tidak akan mengubah posisinya. Pada sisi lain, Delegasi DPR RI menyampaikan undangan kepada Ketua DPR RI untuk datang berkunjung ke Indonesia, serta mengikuti Sidang Inter-Parlementary Union ke-144 yang akan diselenggarakan pada Maret 2022 di Indonesia</p> <p><b>6. Pertemuan dengan Kelompok Minoritas/oposisi di Parlemen Serbia dipimpin oleh Imamovic Enis</b></p> <p>Enis menyampaikan bahwa pihaknya sebagai satu-satunya oposisi di Parlemen Serbia yang ada sejak sistem multipartai diberlakukan di Serbia 40 tahun lalu. Kelompok ini menurut dia adalah himpunan kelompok minoritas yang memperjuangkan hak-hak minoritas secara konstitusional. Lebih jauh Enis menyampaikan keinginan dari Indonesia untuk belajar terkait desentralisasi dalam bingkai demokrasi mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pada sisi lain ia menyoroti menyampaikan Serbia sebagai mitra tenaga kerja Indonesia dimana standar SDM Serbia sesuai standar Uni Eropa. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan sebagai competitor tapi Indonesia sebagai mitra. Ia juga menilai Indonesia selain Turki merupakan negara tujuan bagi minoritas Muslim di Serbia sebagai tujuan studi. Pada kesempatan tersebut, pihak kelompok oposisi menyayangkan selebrasi genosida di Serbia masih dirayakan.</p> <p>Sementara Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan kemajemukan yang sangat besar termasuk multipartai. Kendati demikian, sambung dia, Indonesia tetap satu dalam keragaman.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Disampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk sekitar 276 juta jiwa dan 17 ribu pulau. Pada sisi lain, sejak tahun 1945 sampai saat ini dinamika demokrasi Indonesia mengalami pasang surut. Ditegaskan pula bahwa Indonesia sangat mendukung Serbia untuk menjadi negara anggota Uni Eropa.</p> <p>Pada kesempatan tersebut Dr Fadli Zon menegaskan bahwa oposisi sangat penting bagi pembangunan demokrasi. Menurut dia, tanpa oposisi maka tak ada demokrasi. Dijelaskan juga terkait desentralisasi di Indonesia dalam bentuk pemberian hak istimewa terhadap tiga provinsi khusus. Juga dijelaskan mekanisme otsus dengan pemberian insentif anggaran khusus sebagai affirmative action sehingga melalui mekanisme tersebut dapat memberikan kedamaian dan stabilitas di beberapa wilayah Indonesia yang rentang memisahkan diri. Secara prinsip, Indonesia memberikan kewenangan secara longgar kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakannya selain antara lain pencetakan uang, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Upaya lain dalam menjaga integritas, Indonesia menempuh kebijakan pemekaran pemerintah daerah.</p> <p><b>7. Pertemuan dengan Asosiasi Sastrawan Serbia.</b></p> <p>Delegasi diterima oleh Mrs. Grozdana Lalic, Sekjen ASS, didampingi oleh Mr. Viktor Lazic, penulis sekaligus anggota Board untuk Kerjasama internasional dan penasihat hukum dan Mrs. Gordana Vlajic, penulis dan anggota Board ASS.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya yang dilakukan oleh ASS dalam membantu para penulis di Serbia, termasuk permasalahan tax royalty dan kesejahteraan para penulis. Disampaikan bahwa di Serbia ada sekurang-kurangnya 300 museum sementara di Indonesia terdapat lebih dari 500 museum. Kedua pihak sepakat perlunya menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya dan sastra. Kedua pihak juga sepakat pentingnya peran parlemen dalam menjembatani kepentingan masyarakat di masing-masing negara.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p><b>8. Pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Telekomunikasi, Mr. Stevan Nikcevic</b></p> <p>Delegasi disambut Stevan Nikcevic, Wakil Menteri, yang menyampaikan beberapa poin strategis antara lain bahwa Serbia dan Indonesia memiliki hubungan sangat baik sejak lama. Ia mengakui bahwa pada Mei tahun lalu nilai perdagangan kedua negara merupakan yang terendah yaitu sekitar 20 US\$ juta sebagai akibat pandemi. Menurut dia bahwa terjadi penurunan impor dari Indonesia sekitar 50% dan demikian pula investasi yang masih rendah dari Indonesia di Serbia dimana hanya di sektor makanan.</p> <p>Ketua Delegasi Mardani Ali Sera menegakkan potensi Indonesia dengan 276 juta jiwa dengan bonus demografi 50% populasi angkatan muda Indonesia yang akan menjelajahi dunia termasuk ke Serbia. Ia menilai nilai strategis Serbia ke depan yang akan menjadi anggota Uni Eropa. Pada sisi lain, ia melihat pentingnya memanfaatkan kebijakan resiprokal bebas visa dalam kerangka meningkatkan bisnis antarmasyarakat atau antar UMKM. Ia kemudian meminta mengotimalkan kesepakatan KADIN kedua negara yang telah ditandatangani pada tahun 2019.</p> <p>Fadli Zon menilai bahwa kerjasama ekonomi kedua negara harus terus digali termasuk sektor pariwisata dan pertanian. Ia menegaskan parlemen sebagai jembatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi. Hal lain lagi bahwa kesepakatan KADIN antarkedua negara harus diwujudkan ke dalam bentuk aksi nyata atau proyek bisnis.</p> <p>Sementara Putu Supadma Rudana mengakui bahwa perdagangan dan pariwisata mendapatkan tantangan sangat berat. Ia menyebutkan bahwa di Indonesia sepanjang tahun 2020 telah kehilangan sekitar 17 juta turis. Sementara Serbia sendiri menurut Stevan telah kehilangan sekitar 95% turisnya.</p> <p>Di sisi lain Putu menegaskan bahwa Indonesia dengan lebih 270 juta dan kawasan ASEAN dengan sekitar 600 juta merupakan pasar yang sangat potensial. Indonesia sebagai hub ASEAN dan Serbia sebagai hub Balkan dengan populasi sekitar 60 juta jiwa. Perlu juga dipertimbangkan</p>



NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>travel bubble dan direct flight untuk memaksimalkan kebijakan bebas visa. Hal lain untuk mempromosikan pariwisata adalah memanfaatkan influencer dari kedua negara sebagai bagian dari kebijakan <i>low budget but high impact</i>.</p> <p><b>9. Pertemuan dengan Dubes RI untuk Serbia dan Montenegro di Beograd, Serbia</b></p> <p>Dubes RI di Beograd, Y.M. Chandra Widya Yudya dengan hangat menerima delegasi selama kunjungan di Serbia. Disampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Serbia telah terjalin dengan baik sejak lama. Kedua negara merupakan inisiator gerakan Non Blok, sehingga kedekatan sejarah tersebut terus berkembang dengan baik sampai saat ini. Dalam hubungan perdagangan, kedua negara juga telah melakukan kerjasama dengan baik, beberapa pengusaha Indonesia juga telah melakukan investasi di Serbia. Pemerintah Serbia memiliki interest yg tinggi akan dialog antar umat beragama dan telah empat kali melakukan konferensi. Mereka memandang Indonesia sebagai mitra penting dalam dialog antar umat beragama dan memandang demokrasi di Indonesia sudah maju. Dalam penanganan Covid, Pemerintah Serbia juga telah melakukan berbagai langkah yang maju, termasuk dalam pemberian vaksin kepada warganya. Terkait vaksin, Serbia telah bekerjasama dengan rusia dalam memproduksi vaksin Sputnik V. Pemerintah Serbia juga sangat menghargai posisi Indonesia terkait dengan isu Kosovo yang mengedepankan kedaulatan dan integritas wilayah bukan memandang isu tersebut dari sudut pandang agama/ras. Terkait visa, Pemerintah Serbia telah memberlakukan kebijakan bebas visa masuk ke Serbia bagi WNI, baik pemegang paspor diplomatik, dinas maupun paspor biasa untuk periode kunjungan 30 hari dalam waktu satu tahun. Jumlah WNI yang ada di Serbia tidak terlalu banyak, hanya sekitar 130 orang, dan KBRI terus berupaya untuk dapat melakukan perlindungan bagi setiap WNI yang ada disana.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSR	<p><b>16 November 2021</b></p> <p><b>The 11th Meeting of Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP-11)</b></p> <p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Sihar P. Sitorus (F-PDIP) Wakil Ketua BKSAP DPR RI, bersama Anggota BKSAP Muslim, S.HI., MM (F-P Demokrat), Arzeti Bilbina, SE., MAP (F-PKB), Puteri Anetta Komarudin, B.Com (F-P Golkar), I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M. (F-P PDIP), dan Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc. (F-P NasDem) menghadiri <i>the 11th Meeting of Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP-11)</i> yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa, 16 November 2021 dari Phnom Penh, Kamboja. ASEP Meeting merupakan forum yang menghimpun parlemen-parlemen negara anggota ASEM dan bersidang sekali tiap dua tahun di negara tuan rumah ASEM Summit.</p> <p>Sidang ke-11 ASEP ini mengusung tema “Strengthening Parliamentary Partnership for Peace and Sustainable Development in the Era of COVID-19 and Beyond”, dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) Parlemen negara anggota ASEP dan observer dari Parlemen Eropa serta Sekretariat ASEAN. Sidang ASEP11 ini merupakan official side-event dari The 13th Asia-Europe Meeting (ASEM) Summit.</p> <p>Agenda sidang terdiri dari Upacara Pembukaan, Sidang Pleno Pertama dan tiga Panel Diskusi yang berjalan secara paralel dengan topik diskusi masing-masing serta ditutup dengan Sidang Pleno Kedua.</p> <p>First Plenary ASEP11 beragendakan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Sidang ASEP11 dan pernyataan (Statement) dari masing-masing perwakilan delegasi terkait tema Sidang.</p> <p>Dr. Sihar P. Sitorus dalam statement-nya menyampaikan bahwa dampak dari Covid-19 berpengaruh besar terhadap sektor kesehatan, sosial dan ekonomi, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kerjasama negara-negara ASEP, karenanya, harus dapat mempromosikan dan menjaga perdamaian serta pembangunan manusia.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Perdamaian yang membawa stabilitas, menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan terkait pencapaian SDGs dan pandemi di masa mendatang.</p>
		<p>Pada Panel Discussion 1 dengan tema “Proactive Parliaments for Peace, Security, and Shared Prosperity” diawali dengan paparan ahli tentang kondisi dunia yang telah berubah dan mengalami berbagai ancaman baru sehingga memerlukan pendekatan baru dalam mengatasi atau mencegah konflik di dunia paska pandemi. Kemudian dilanjutkan dengan intervensi dari masing-masing delegasi anggota ASEP.</p> <p>Puteri Anetta Komarudin, B.Com. yang juga anggota Komisi XI, dalam intervensinya menyampaikan bahwa selama dua tahun belakangan seluruh dunia menerima dampak yang besar dari pandemi Covid-19, salah satu dampaknya adalah ketidakstabilan serta konflik yang terjadi di berbagai negara yang dapat menciptakan peperangan di negara tersebut.</p> <p>Politisi dari Partai Golkar ini juga menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi rekan sejati bagi seluruh negara di dunia dengan berfokus kepada menciptakan perdamaian, pencegahan konflik, pembangunan berkelanjutan dan kontra-terorisme.</p> <p>Panel Diskusi 2 diawali dengan paparan ahli tentang upaya membangkitkan ekonomi dunia dengan pendekatan holistik yang dapat dilakukan secara 4R dan 3P, yaitu Re-opening, Resettling, Rebuilding, Resilience serta People, Prosperity dan Planet. Agenda selanjutnya yaitu intervensi dari masing-masing delegasi anggota ASEP.</p> <p>I Gusti Agung Rai Wirajaya, yang juga anggota Komisi XI ini, dalam intervensinya menyampaikan bahwa untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia serta kesejahteraan rakyat Indonesia.</p> <p>Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa Pemerintah Indonesia telah menciptakan peraturan keuangan terkait dengan program pemulihan nasional dari Covid-19, UMKM,</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>ekonomi digital, dan e-commerce serta Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja, menarik investasi, dan diharapkan akan menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.</p> <p>Politisi dari daerah pemilihan Bali ini juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19, selain berdampak negatif juga memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam upaya pemulihan nasional yang sekaligus menjadi upaya Indonesia untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs).</p> <p>Panel Discussion ini diakhiri dengan penyampaian ringkasan dari keseluruhan diskusi oleh Rapporteur. Hasil panel diskusi ini akan menjadi bagian dari rekomendasi parlemen pada the 13th Asia Europe Meeting (ASEM) Summit.</p>
		<p>Diskusi panel 3 diawali dengan paparan para ahli. Presentasi pertama tentang ketahanan pangan dalam upaya pemulihan dunia dari pandemi Covid-19. Ketahanan pangan memiliki keterkaitan dalam upaya pembangunan keberlanjutan (SDGs) serta perubahan iklim, karenanya upaya mempertahankan ketahanan pangan sejalan dengan upaya pemulihan yang dilakukan berbagai negara di dunia.</p> <p>Presentasi kedua tentang tantangan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan di sepanjang sungai Mekong untuk memenuhi kebutuhan air, pangan serta energi bagi masyarakat yang dilalui oleh sungai Mekong. Agenda selanjutnya yaitu intervensi dari masing-masing delegasi anggota ASEP.</p> <p>Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc. yang juga anggota Komisi VII ini dalam intervensinya menyampaikan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, yaitu dengan menambahkan sebesar 23% sumber energi terbarukan pada tahun 2025, serta upaya yang dilakukan oleh DPR RI untuk membuat peraturan terkait energi terbarukan untuk mendukung upaya Indonesia mencapai Net Zero Emission di tahun 2060.</p> <p>Politisi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini menjelaskan bahwa Indonesia juga telah melakukan pembangunan Food Estate yang diharapkan dapat menjaga</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>ketahanan pangan Indonesia. serta upaya merehabilitasi hutan untuk mencegah terjadinya krisis air yang sesuai dengan upaya SGDs nomor 6 (Ensuring access to water and sanitation for all).</p> <p>Sidang ditutup dengan Second Plenary yang beragendakan penyampaian laporan masing-masing Rapporteur atas penyelenggaraan 3 (tiga) Panel Discussion; laporan dari Drafting Committee, dan adopsi Deklarasi ASEP-11. Hasil dari Sidang ASEP11 ini akan disampaikan sebagai rekomendasi parlemen kepada The 13th Asia Europe Meeting (ASEM) Summit.</p> <p>Deklarasi ASEP-11 memuat antara lain seruan upaya kolektif untuk melawan Pandemi Covid-19 dalam kerangka kerjasama dan kemitraan hubungan parlemen Asia-Eropa yang lebih baik untuk pencapaian perdamaian, keamanan dan pembangunan berkelanjutan serta kebangkitan bersama dengan kondisi yang lebih kuat pasca pandemi.</p>
	BKSAP - KSR	<p><b>17 November 2021</b></p> <p><b>Sidang Drafting Committee of the 29th Annual Meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF-29)</b></p> <p>Dr. Sihar P. Sitorus (F-PDIP) Wakil Ketua BKSAP DPR RI didampingi Anggota BKSAP Singgih Januratmoko, S.K.H., MM menghadiri Sidang Drafting Committee of the 29th Annual Meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF-29) yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, 17 November 2021 dari Seoul, Korea Selatan.</p> <p>Sidang Drafting Committee ini membahas 4 (empat) Draft Resolusi dari 13 (tiga belas) Draft Resolusi hasil pembahasan 4 (empat) Working Group Meeting di bidang politik dan keamanan; ekonomi dan perdagangan; kerjasama regional kawasan; dan isu-isu perempuan. Working Group ini telah sidang virtual secara maraton pada 8,9,11,12 November 2021 lalu.</p> <p>Draft Resolusi yang belum berhasil mencapai konsensus pada pembahasan di Working Group yaitu Draft Resolusi tentang penguatan kerjasama multilateralisme, Draft Resolusi tentang Semenanjung Korea, Draft Resolusi tentang peran parlemen dalam penguatan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>integrasi ekonomi dan promosi perdagangan di kawasan; dan Draft Resolusi tentang pemberantasan terorisme dan ekstrimisme di kawasan Asia Pasifik.</p> <p>Sidang Drafting Committee berhasil menyetujui Draft Resolusi di Working Group Ekonomi. Sedangkan Draft Resolusi tentang penguatan kerjasama multilateralisme dan Draft Resolusi tentang Semenanjung Korea yang merupakan pembahasan Working Group di bidang politik akan dilanjutkan pembahasannya pada Jum'at, 17 November 2021</p> <p>Hasil dari Sidang Drafting Committee ini akan dibahas dan diadopsi pada Sidang Pleno APPF yang akan diselenggarakan secara luring pada 13-15 Desember 2021 di Seoul - Republik Korea.</p>
	BKSAP - KSB	<p><b>29 November 2021</b></p> <p>Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Palestina, Syahrul Aidi Maazat menghadiri <i>International Day of Solidarity with the Palestinian People</i>, di Kedutaan Besar Palestina</p> <p>Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Palestina menghadiri peringatan 74 tahun <i>International Day of Solidarity with the Palestinian People</i> di Kedutaan Besar Palestina yang jatuh pada tanggal 29 November 2021.</p> <p>DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta hak – hak masyarakat Palestina melalui diplomasi antar-parlemen dan forum forum internasional seperti IPU dan PUIC.</p>

## LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	JUDUL	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Mahkamah Kehormatan Dewan telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Polres Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Polres Karawang, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Sosialisasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Anggota DPR RI	
2.		Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting dalam rangka Penegakan Pelanggaran Kode Etik Pejabat Publik, Komparasi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 November 2021 dan 8 – 10 November 2021 dalam rangka Sinergi Hukum dan Etika dalam Penegakan Etika Anggota DPR RI,	Kegiatan tersebut Mahkamah Kehormatan Dewan mengundang Dr. Guntur Freddy Prisanto, SE., SH., M.Hum, Rahmat Bagja, SH., L.LM., dan Agus Yulianto S.E., M.M sebagai narasumber

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	15-17 Nopember 2021 Kunjungan kerja ke Bandara Fatmawati Bengkulu	---	
2.	18 Nopember 2021 1. Rapat Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan III Tahun 2021 Satker Dewan dan Satker Setjen. 2. Rapat BURT, agenda: 1. Laporan Panja-Panja 2. Lain-lain	1. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2021 Satuan Kerja Dewan sebesar <b>Rp2.824.589.432.581,-</b> atau <b>66,83%</b> dari pagu sebesar <b>Rp4.226.250.874.000,-</b> . 2. Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2021 Satker Setjen sebesar <b>Rp1.020.193.589.608,-</b> atau <b>65,15%</b> dari pagu sebesar <b>Rp1.565.928.509.000,-</b> .	
3.	19-21 Nopember 2021 Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat	---	
4.	Rapat BURT, 22 Nopember 2021 Agenda: Evaluasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja BURT dalam rangka program Jamkestama	Kegiatan kunjungan kerja BURT dalam rangka pengawasan program Jamkestama di rumah sakit provider akan memberdayakan kantor cabang Asuransi Jasindo secara lebih aktif.	



NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
5.	<p>Rapat BURT, 24 Nopember 2021</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan Keprotokolan di Bandara.</li> <li>2. Pembahasan Security System di Kompleks Perkantoran DPR RI dan Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BURT meminta Biro Protokol menghitung kebutuhan anggaran untuk melakukan kerjasama dengan Joumpa untuk tahun 2022.</li> <li>2. Biro Umum harus memastikan seluruh kartu akses tidak disalahgunakan dan hanya dimiliki oleh pihak yang berkepentingan di Kompleks Parlemen Senayan serta Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami.</li> <li>3. Biro Umum segera melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pengamanan Dalam (Pamdal) serta sistem keamanan (<i>Security System</i>) di Kompleks Perkantoran DPR RI dan RJA Kalibata dan RJA Ulujami.</li> </ol>	
6.	<p>25-27 Nopember 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Pattimura, Ambon.</li> <li>2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.</li> </ol>	---	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR/BPR RI; Sekretariat Kementerian KLHK RI; Kementerian Pertanian RI.	Pelaksanaan keuangan negara	Rapat Dengar Pendapat BAKN dengan Sekjen Kementerian ATR/BPR RI, Sekjen Kementerian KLHK RI dan Sekjen Kementerian Pertanian RI. terkait dengan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Rapat dengar Pendapat dilaksanakan secara terbuka pada hari Selasa, 16 November 2021
2.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI	Pelaksanaan keuangan negara	Rapat Konsultasi BAKN dengan BPK RI dalam rangka telaah BAKN terhadap LHP BPK RI terkait Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Rapat Konsultasi dilaksanakan pada hari Jum'at, 26 November 2021

\*\*\*\*\*